



**PTA** Jujur  
**JAKARTA** Unggul  
**JUARA** Amanah  
Responsif  
Akuntabel

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# 2025

# LAPORAN KEUANGAN

(UNAUDITED)

**UAKPA (401113)**

**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
BAGIAN ANGGARAN 005.04**



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri atau Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas kementerian atau lembaga yang dipimpinnya.

Sebagai salah satu entitas akuntansi di bawah naungan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berkewajiban menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Perwujudan tanggung jawab tersebut dituangkan dalam Laporan Keuangan Satker, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan UAKPA 005.04 (*Unaudited*) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang akuntabel. Dengan penerapan basis akrual, laporan ini diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Besar harapan kami agar Laporan Keuangan UAKPA 005.04 (*Unaudited*) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai instrumen pendukung bagi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Jakarta, 19 Februari 2026  
Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos., M.M  
NIP. 197803272002122001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB</b> .....	1
<b>RINGKASAN LAPORAN</b> .....	2
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	4
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	6
<b>LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	7
<b>NERACA</b> .....	8
<b>LAPORAN OPERASIONAL</b> .....	9
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b> .....	10
<b>A. PENJELASAN UMUM</b> .....	11
<b>A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta</b> .....	11
<b>A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan</b> .....	12
<b>A.3 Basis Akuntansi</b> .....	12
<b>A.4 Dasar Pengukuran</b> .....	13
<b>A.5. Kebijakan Akuntansi</b> .....	13
<b>B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN</b> .....	21
<b>B.1 Pendapatan</b> .....	21
<b>B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak</b> .....	21
<b>B.2 Belanja</b> .....	23
<b>B.2.1 Belanja Pegawai</b> .....	24
<b>B.2.2 Belanja Barang</b> .....	24
<b>B.2.3 Belanja Modal</b> .....	25
<b>B.3 Capaian Output</b> .....	27
<b>C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA</b> .....	29
<b>C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran</b> .....	29
<b>C.2 Kas di Bendahara Penerimaan</b> .....	29
<b>C.3 Persediaan</b> .....	30
<b>C.4 Ekuitas</b> .....	30
<b>D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL</b> .....	31
<b>Pendapatan</b> .....	31
<b>D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak</b> .....	31
<b>Beban Operasional</b> .....	31
<b>D.2 Beban Persediaan</b> .....	31

<b>D.3 Beban Barang dan Jasa .....</b>	<b>32</b>
<b>D.4 Beban Perjalanan Dinas .....</b>	<b>33</b>
<b>D.5 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....</b>	<b>33</b>
<b>D.6 Pos Luar Biasa.....</b>	<b>34</b>
<b>E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....</b>	<b>35</b>
<b>E.1 Ekuitas Awal .....</b>	<b>35</b>
<b>E.2 Surplus (Defisit) LO.....</b>	<b>35</b>
<b>E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.....</b>	<b>35</b>
<b>E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas.....</b>	<b>36</b>
<b>E.5 Transaksi Antar Entitas.....</b>	<b>36</b>
<b>E.6 Ekuitas Akhir.....</b>	<b>38</b>

## **PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB**

Laporan Keuangan UAKPA 005.04 (*Unaudited*) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Laporan Keuangan Satker telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara wajar, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Jakarta, 19 Februari 2026  
Plt. Sekretaris,



Wahida Muslihah, S.Sos.M.M  
NIP. 197803272002122001

## **RINGKASAN LAPORAN**

Laporan Keuangan UAKPA 005.04 (Unaudited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan ini meliputi :

### **LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,310,000 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,310,000 atau mencapai 132.76 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1,740,000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp432,840,250 atau mencapai 99.76 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp433,865,000.

### **NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp0; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,310,000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp432,840,250 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-430,530,250, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-430,530,250.

### **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-430,530,250 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 430,530,250 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp0.

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajurkan oleh Standar AKuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024.....	7
Tabel 2. Neraca 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	8
Tabel 3. Laporan Operasional 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024 .....	9
Tabel 4. Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap .....	18
Tabel 5. Penggolongan Masa manfaat Aset tak berwujud .....	19
Tabel 6. Anggaran DIPA Awal 2025.....	21
Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan tahun 2025 .....	21
Tabel 8. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	22
Tabel 9. Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	22
Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025	23
Tabel 11. Perbandingan realisasi belanja tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024	24
Tabel 12. Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	24
Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang (Unaudited) TA 2025 dan 2024.....	25
Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	29
Tabel 15. Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	29
Tabel 16. Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	30
Tabel 17. Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024 .....	30
Tabel 18. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024 .....	31
Tabel 19. Rincian beban persediaan tahunan (unaudited) TA 2025 dan 2025.....	32
Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 .....	32
Tabel 21. Rincian beban perjalanan dinas (unaudited) TA 2025 dan 2024.....	33
Tabel 22. Rincian Surplus (deficit) dari kegiatan non operasional lainnya.....	33
Tabel 24. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 .....	34
Tabel 25. Ekuitas awal TA 2025 dan 2024 .....	35
Tabel 26. Surplus (defisit) LO TA 2025 dan 2024 .....	35
Tabel 27. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar .....	36
Tabel 28. Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas.....	36
Tabel 29. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025.....	37

Tabel 30. Rincian Transfer Keluar Tahun 2025.....	37
Tabel 31. Transfer masuk .....	38

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 ..... 23

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dan 2024

U R A I A N	CATATAN	TA 2025		% THD ANGG	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	1,740,000	2,310,000	132,76	1,770,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		1,740,000	2,310,000	132,76	1,770,000
<b>BELANJA</b>	<b>B.2</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	-	-	-	-
Belanja Barang	B.2.2	433,865,000	432,840,250	99,76	206,083,000
Belanja Modal	B.2.3	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		433,865,000	432,840,250	99,76	206,083,000



Jakarta, 19 Februari 2026  
Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos, M.M  
NIP. 197803272002122001

**NERACA**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR**  
**SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

Tabel 2. Neraca 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

U R A I A N	CATATAN	2025	2024
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Persediaan	C.3	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.4	-	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		-	-



Jakarta, 19 Februari 2026  
Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M  
NIP. 197803272002122001

**LAPORAN OPERASIONAL  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR  
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

Tabel 3. Laporan Operasional 31 Desember 2025 Dan 31 Desember 2024

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	2,310,000	1,770,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>2,310,000</b>	<b>1,770,000</b>
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Persediaan	D.2	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.3	353,620,250	28,453,000
Beban Perjalanan Dinas	D.4	79,220,000	177,630,000
<b>Jumlah Beban</b>		<b>432,840,250</b>	<b>177,630,000</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.5	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		-	-
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.6		
Pendapatan PNBPNP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>



Jakarta, 19 Februari 2026  
 Plt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M  
 NIP. 197803272002122001

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	CATATAN	2025	2024
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	430,530,250	204,313,000
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	-	-



Jakarta, 19 Februari 2026  
Pt. Sekretaris,

Wahida Muslihah, S.Sos.M.M  
NIP. 197803272002122001

## **A. PENJELASAN UMUM**

### **A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta**

Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Raja Belanda (Koninklijk Besluit) Raja Willem II tanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152, terdiri dari 7 pasal. Keputusan Raja Belanda tersebut dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 153.

Setelah pendirian lembaga peradilan agama seperti diatur dalam dua Staatsblad di atas, Pemerintah Hindia Belanda mengatur kewenangan absolut peradilan agama dalam Staatsblad 1937 Nomor 116 tanggal 1 April 1937 meliputi: nikah, talak, rujuk, mahar dan tuntutan nafkah. Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura dibentuk pada tanggal 7 Maret 1938 bertepatan tanggal 5 Muharam 1357H berdasarkan Staatsblad 1937 Nomor 610 bertempat di Gedung Cikini No. 8, Jakarta. Bersamaan dengan perpindahan Ibu Kota Negara ke Yogyakarta, pada tanggal 1 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi di Jakarta dipindahkan ke Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor T2 tanggal 2 Januari 1946.

Dalam tahun yang sama, Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor IJSD tanggal 3 Januari 1946 Tentang Pembentukan Kementerian Agama RI. Selanjutnya berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tanggal 25 Maret 1946, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke Kementerian Agama.

Pada tahun 1976, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 Tentang Pembentukan dua Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surakarta di Wilayah Bandung dan Surabaya. Cabang Mahkamah Islam Tinggi Bandung meliputi wilayah hukum Jawa Barat dan Jakarta dan untuk Cabang Mahkamah Islam Tinggi Surabaya meliputi wilayah hukum Jawa Timur dan Madura. Kedua cabang Mahkamah Islam Tinggi tersebut dipimpin oleh seorang Wakil Ketua yang bertanggung jawab kepada Ketua Mahkamah Islam Tinggi Surakarta.

Nomenklatur Mahkamah Islam Tinggi diubah menjadi Pengadilan Tinggi Agama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980. Adapun nomenklatur peradilan tingkat pertama disebut Pengadilan Agama. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 1985 tanggal 20 Oktober 1985 Pengadilan

Tinggi Agama Surakarta dipindahkan kembali ke Jakarta. Keputusan itu baru dapat dilaksanakan dan diresmikan dengan nomenklatur Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987, bersamaan dengan dilantikannya, Drs. H. M. Taufik sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang berkantor di Jalan Cemara Nomor 42, Jakarta Pusat.

Kemudian pada akhir tahun 1999, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menempati gedung milik pemerintah daerah DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Raden Inten II, Nomor 3, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pada era ini Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki tugas untuk melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Mahkamah Agung di wilayah DKI Jakarta, yaitu membantu para pencari keadilan dalam lingkup peradilan agama, khususnya agama Islam. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memiliki visi “TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”. Dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan;
2. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan;
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
4. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Peradilan.

### **A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan UAKPA 005.04 (Unaudited) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan Satker ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

### **A.3 Basis Akuntansi**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,

Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarhal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan PeJulirntah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### **A.4 Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan sdalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satker adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan Satker menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Satker Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Satker ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar,

terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satker adalah sebagai berikut :

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
  - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
  - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
    - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
    - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- c. Penyusutan Aset Tetap
- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 266/KM.6/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/Km.6/2019 Tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 30 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

- d. Piutang Jangka Panjang
  - Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
  - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.
- e. Aset Lainnya
  - Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo

lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Tabel 5. Penggolongan Masa manfaat Aset tak berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang

Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mendapat anggaran sebesar Rp.2,936,938,000.

Tabel 6. Anggaran DIPA Awal 2025

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,740,000	1,740,000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1,740,000</b>	<b>1,740,000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Barang	433,865,000	433,865,000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>433,865,000</b>	<b>433,865,000</b>

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2,310,000 atau mencapai 132,76% persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1,740.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2,310,000. Pendapatan ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perbedaan perkara diselesaikan sebesar 69 perkara dibandingkan tahun 2024. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan tahun 2025

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,936,938,000	2,604,928,231	88.70
<b>Jumlah</b>	<b>2,936,938,000</b>	<b>2,604,928,231</b>	<b>88.70</b>

#### B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp2,310,000 dan Rp1,770,000. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI T.A.2025</b>	<b>REALISASI T.A. 2024</b>	<b>%</b>
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,310,000	1,770,000	30,51
<b>Jumlah</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>30,51</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 30.51 persen dari TA 2024, terdapat perbedaan jumlah perkara yang terselesaikan atau diputus di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat beban perkara sebesar 206 perkara banding dengan 179 perkara diselesaikan sedangkan di tahun 2025 beban perkara banding sebesar 271 dengan 248 perkara yang diselesaikan. Sedangkan Rincian PNBP adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Perbandingan Rincian PNBP Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

<b>URAIAN</b>	<b>REALISASI T.A. 2025</b>	<b>REALISASI T.A. 2024</b>	<b>%</b>
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya (biaya proses)	2,310,000	1,770,000	30,51
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	-	-
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>30,51</b>

Keseluruhan pendapatan berasal dari biaya proses perkara banding di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta selama tahun 2025.

## B.2 Belanja

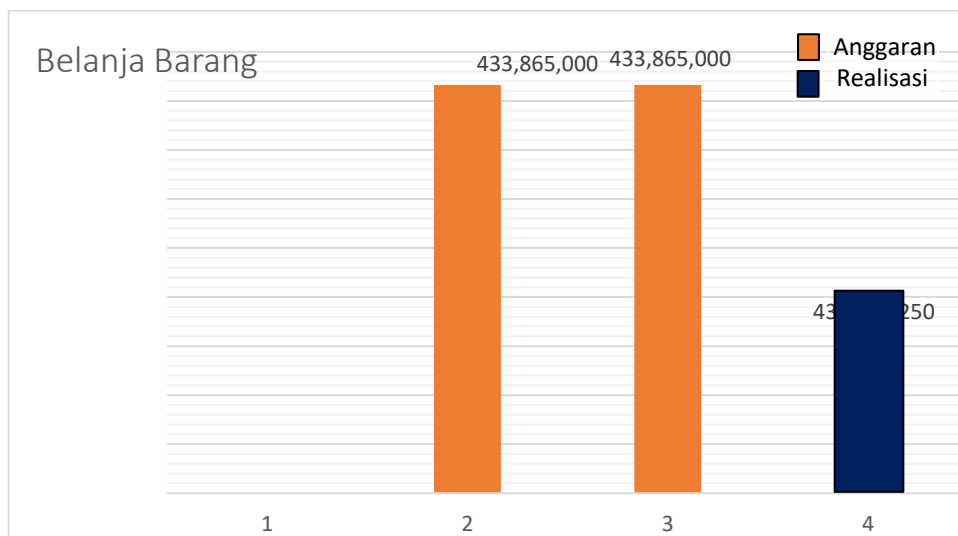
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp432,840,250 atau 99,76 persen dari anggaran belanja sebesar Rp.432,840,250. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	433,865,000	432,840,250	99,76
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>433,865,000</b>	<b>432,840,250</b>	<b>99,76</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 1. Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 110.03% adanya peningkatan jumlah anggaran seiring bertambahnya kegiatan di TA 2025, diantaranya tambahan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan PNBPN dan percepatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Tabel 11. Perbandingan realisasi belanja tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Realisasi TA 2025	Realisasi TA 2024	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	432,840,250	206,083,000	110,03
Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>432,840,250</b>	<b>206,083,000</b>	<b>110,03</b>

### B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan anggaran belanja pegawai terdapat pada DIPA Badan Urusan Administrasi (005.01) pada seluruh satuan kerja sewilayah Jakarta. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 12. Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Jumlah belanja pegawai bernilai nol dikarenakan pada DIPA Direktorat Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak memiliki anggaran belanja pegawai.

### B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp432,840,250 dan Rp206,083,000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa

yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 110.03% dari Realisasi TA 2024.

Tabel 13. Perbandingan Belanja Barang (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	23,530,000	23,653,000	(0,52)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Jasa	330,090,250	4,800,000	6,776.88
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	79,220,000	177,630,000	(55,40)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>432,840,250</b>	<b>206,083,000</b>	<b>110,03</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>432,840,250</b>	<b>206,083,000</b>	<b>110,03</b>

### B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 dan TA 2024 sama saja bernilai 0. Hal ini disebabkan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama satker Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak mendapat anggaran belanja akun 53 atau belanja Modal dalam 2 tahun terakhir.

Tabel 1. Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### B.3 Capaian Output

Nama Satuan Kerja	Kode	Belanja				Keluaran				Keterangan
		Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat	66,850,000	470.000		7	7	Kegiatan	-	Terkena efisiensi
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Pengelolaan PNPB	89,350,000	-		1	-	Kegiatan	-	Belum ada kegiatan yang terlaksana
	1053.AEA - Koordinasi	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama	361,000,000	9.600.000	11,2	1	-	Kegiatan	32.8	Sudah ada realisasi
Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/dll.)*	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-1)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Efisiensi Anggaran				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-2)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Perbaikan Revisi Efisiensi dari Badilag				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-3)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Buka Blokir Efisiensi Anggaran, kecuali pagu perjadi				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-4)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-5)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	181.200.000	Buka Blokir PNPB dan Pergeseran Anggaran				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-6)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	517.200.000	Revisi Halaman III, Pagu Anggaran Tetap				Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran		
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-7)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	517.200.000	Revisi Halaman III				Tidak ada penambahan atau		

					pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-8)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000	Buka Blokir Perjalanan Dinas, Penarikan Pagu Belanja Barang tersebut	Terdapat Pengurangan Anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-9)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000	Revisi POK Belanja Barang Pagu yang bersumber dana PNBP	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran
	DIPA-005.04.2.401113/2025 (revisi ke-10)	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	433,865,000	Revisi POK Optimalisasi Belanja Barang Pagu yang bersumber dana PNBP	Tidak ada penambahan atau pengurangan anggaran

Penjelasan Capaian Output :

1. Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat terkena efisiensi anggaran dari Mahkamah Agung RI sehingga kegiatan tidak bisa direalisasikan seluruhnya;
2. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan PNBP telah terlaksana pada tahun 2025 dan memenuhi target pelaksanaan 100%;
3. Kegiatan Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama telah terlaksana di Tahun 2025 dengan capaian 100%;
4. DIPA 005.04 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengalami 6 kali revisi menyesuaikan kebutuhan dan juga arahan dari pimpinan Mahkamah Agung seiring berjalannya pelaksanaan anggaran di tahun 2025.

### C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

#### Aset Lancar

##### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan tentang Kas di Bendahara Pengeluaran :

Kas di Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dinihilkan sebelum 31 Desember 2025.

##### C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 15. Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Kas di Bendahara Penerimaan telah nihil di akhir tahun anggaran 2025. Untuk kas yang berasal dari Rekening RPL Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah dilakukan penyetoran terhadap seluruh biaya proses perkara.

### C.3 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Penjelasan Persediaan : tidak ada anggaran persediaan di tahun anggaran 2025 dan 2024 untuk DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

### C.4 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Tabel 17. Ekuitas Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Ekuitas	-	-
<b>Total</b>	-	-

Ekuitas pada tahun 2025 bernilai Rp0 dan pada tahun 2024 bernilai Rp0. Tidak ada saldo neraca pada ekuitas akhir tahun 2024 dan 2025.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

### Pendapatan

#### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp2,310,000 dan Rp1,770,000. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 30.51. Hal tersebut disebabkan oleh PNBPN seluruhnya berasal dari jumlah biaya proses perkara Banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	-	-	-
Pendapatan Ongkos Perkara	-	-	-
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	2,310,000	1,770,000	30,51
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah padaPanitera Badan Peradilan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2,310,000</b>	<b>1,770,000</b>	<b>30,51</b>

Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 30.51 persen dari TA 2024, terdapat perbedaan jumlah perkara yang terselesaikan atau diputus di tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024 terdapat beban perkara sebesar 206 perkara banding dengan 179 perkara diselesaikan sedangkan di tahun 2025 beban perkara banding sebesar 271 dengan 248 perkara yang diselesaikan.

### Beban Operasional

#### D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Berikut ini adalah rincian beban persediaan tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Tabel 19. Rincian beban persediaan tahunan (unaudited) TA 2025 dan 2025

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	-	-	-

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak memiliki anggaran persediaan dalam DIPA 005.04.

### D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp353,620,250 dan Rp28,453,000.. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 20. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Bahan	23,530,000	23,653,000	(0,52)
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	314,690,250	-	-
Beban Jasa Profesi	15,400,000	4,800,000	220.83
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>353,620,250</b>	<b>28,453,000</b>	<b>1,142.82</b>

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,142.82 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta karena mendapat anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan dan Percepatan Penyelesaian Perkara.

#### D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp79,220,000 dan Rp177,630,000. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024:

Tabel 21. Rincian beban perjalanan dinas (unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	513,450,000	741,970,000	(30.80)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	76,420,000	95,430,000	(19.92)
Beban Perjalanan Tetap - Luar Negeri	853,327,692	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1,443,197,692.00</b>	<b>837,400,000</b>	<b>72.34</b>

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 55.40 persen disebabkan oleh terdapat penurunan anggaran perjalanan dinas dalam kota yang digunakan untuk kegiatan pengawasan rutin di satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.

#### D.5 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Berikut ini adalah rincian Surplus (deficit) dari kegiatan non operasional lainnya. Tidak ada kegiatan non operasional yang menjadi dasar surplus (deficit) pada Laporan Operasional.

Tabel 22. Rincian Surplus (deficit) dari kegiatan non operasional lainnya

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Kerugian Persediaan Rusak/Usang	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### D.6 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024

<b>URAIAN JENIS BEBAN</b>	<b>REALISASI T.A.2025</b>	<b>REALISASI T.A. 2024</b>	<b>%</b>
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Tidak ada pendapatan maupun beban yang muncul selama tahun 2025 yang terjadi di luar kendali entitas.

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel 24. Ekuitas awal TA 2025 dan 2024

<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>T.A.2025</b>	<b>T.A. 2024</b>
Ekuitas	Rp.0	Rp.0.
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.0</b>	<b>Rp.0.</b>

Ekuitas awal tahun anggaran 2025 dan tahun anggaran 2024 berniali Rp.0.

**E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.430,530,250.00 dan Rp.204,313,000.00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Tabel 25. Surplus (defisit) LO TA 2025 dan 2024

<b>EKUITAS AWAL</b>	<b>T.A.2025</b>	<b>T.A. 2024</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>(430,530,250).</b>	<b>(204,313,000)</b>
<b>Jumlah</b>	<b>(430,530,250).</b>	<b>(204,313,000)</b>

Saldo Surplus/Defisit LO diatas merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa dari beban operasional seluruh satuan kerja sewilayah Jakarta.

**E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel 26. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar

<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN</b>	<b>T.A.2025</b>	<b>T.A. 2024</b>
<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar</b>	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

Tidak ada dampak kumulatif atas perubahan kebijakan maupun kesalahan mendasar dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

**E.4 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas**

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Tabel 27. Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas

<b>Koreksi Menambah/Mengurangi Ekuitas</b>	<b>T.A.2025</b>	<b>T.A. 2024</b>
Penyesuaian Nilai Aset	-	-
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Atas Reklasifikasi		
Selisih revaluasi aset		
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi		
Koreksi Lain-Lain		
<b>Jumlah</b>	-	-

Tidak ada koreksi yang menambah maupun mengurangi nilai ekuitas akhir tahun anggaran 2025 dan 2024.

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.430,530,250 dan Rp.204,313,000. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Tabel 28. Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Nilai</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	432,840,250
Diterima dari Entitas Lain	(2,310,000)
Transfer Keluar	(30,005,520)
Transfer Masuk	30,005,520
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
<b>Jumlah</b>	<b>430,530,250</b>

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 432,840,250, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 2,310,000.

Diterima dari entitas lain merupakan keseluruhan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang di terima di tahun 2025 dan 2024. DKEL merupakan keseluruhan belanja atas kegiatan operasional satuan kerja yang dilaksanakan di tahun 2025 dan 2024.

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp-30.005.520 terdiri dari :

Tabel 29. Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

<b>Jenis</b>	<b>Entitas Tujuan</b>	<b>Nilai</b>
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	3,629,700
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Utara	6,049,500
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	-
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Barat	11,615,040
Blanko akta cerai	Pengadilan Agama Jakarta Timur	8,711,280

<b>Jumlah</b>	<b>30,005,520</b>
---------------	-------------------

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp.30.005.520 yang terdiri dari :

Tabel 30. Transfer masuk

<b>Jenis</b>	<b>Entitas Asal</b>	<b>Nilai</b>
Blanko akta cerai	Dirjen Badan Peradilan Agama	30,005,520
<b>Jumlah</b>		<b>60,011,040</b>

#### **E.6 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

**NERACA PERCOBAAN**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005  
UNIT ORGANISASI : 04  
WILAYAH/PROVINSI : 0100  
SATUAN KERJA : 401113

MAHKAMAH AGUNG  
Ditjen Badan Peradilan Agama  
DKI JAKARTA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

*Tgl. Cetak 19/02/2026 9:52 AM*  
*lap\_neraca\_percobaan\_sawal\_akrua\_satker\_poc*

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN  
TINGKAT SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025  
(dalam rupiah)**

**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA** : 005      **MAHKAMAH AGUNG**  
**ESELON I** : 04      **Ditjen Badan Peradilan Agama**  
**WILAYAH/PROVINSI** : 0100      **DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA** : 401113      **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1  
Tanggal : 19/02/26 9:52 AM  
Halaman : 1  
Prg ID : lap\_lra\_pen\_akun\_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1,740,000	2,310,000	0	2,310,000	132.76
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	1,740,000	2,310,000	0	2,310,000	132.76
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	1,740,000	2,310,000	0	2,310,000	132.76
	JUMLAH PENDAPATAN	1,740,000	2,310,000	0	2,310,000	132.76

**NERACA**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG**  
**UNIT ORGANISASI : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA**  
**SATUAN KERJA : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif\_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5

<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-------------------------------------	----------	----------	----------	--

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG 005  
**ESELON I** : Ditjen Badan Peradilan Agama 04  
**SATUAN KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 401113

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM  
Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new\_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>433,865,000</b>	<b>432,840,250</b>	<b>(1,024,750)</b>	<b>99.76</b>	<b>224,365,000</b>	<b>206,083,000</b>	<b>(18,282,000)</b>	<b>91.85</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA** : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,310,000	1,770,000	540,000	30.508
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	2,310,000	1,770,000	540,000	30.508
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	2,310,000	1,770,000	540,000	30.508
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	353,620,250	28,453,000	325,167,250	1,142.822
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	79,220,000	177,630,000	(98,410,000)	(55.402)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
**ESELON I** : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama  
**WILAYAH/PROVINSI** : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
**SATUAN KERJA** : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>432,840,250</b>	<b>206,083,000</b>	<b>226,757,250</b>	<b>110.032</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>	<b>(226,217,250)</b>	<b>110.721</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>	<b>(226,217,250)</b>	<b>110.721</b>
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(430,530,250)</b>	<b>(204,313,000)</b>	<b>(226,217,250)</b>	<b>110.721</b>

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



  
WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG  
UNIT ORGANISASI : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama  
WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA  
SATUAN KERJA : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker\_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(430,530,250)	(204,313,000)	(226,217,250)	110.72
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	430,530,250	204,313,000	226,217,250	110.72
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/26 1:54 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:48 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	432,840,250
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	2,310,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	30,005,520	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	30,005,520
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	2,310,000
3.0	521211	Beban Bahan	23,530,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	15,400,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	314,690,250	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	76,420,000	0
JUMLAH			465,155,770	465,155,770

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

NIP. 197803272002122001

## NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

## TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : ( 04 ) Ditjen Badan Peradilan Agama

WILAYAH/PROVINSI : ( 0100 ) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : ( 401113 ) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 9:51 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_kas\_satker\_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	432,840,250
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	2,310,000	0
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	2,310,000
3.0	521211	Belanja Bahan	23,530,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	15,400,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	314,690,250	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,800,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	76,420,000	0
JUMLAH			435,150,250	435,150,250

Keterangan :

FINAL

Jakarta, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH

197803272002122001

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN  
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)  
TAHUNAN (UNAUDITED) TA 2025**

Kode dan Nama UAKPA : (401113) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
Kode dan Nama Eselon 1 : (005.04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
Kode dan Nama K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
<b>KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	<b>Laporan Keuangan Tambahan</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
<b>KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI</b>				
	<b>Kesesuaian Saldo</b>	<b>Sama</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
2	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
<b>PENGECEKAN PADA MONSAKTI</b>				
	<b>To Do List</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	<b>Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak

		Ya	Tidak	Seharusnya
	<b>Rekon Internal</b>			
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	<b>Daftar MONSAKTI</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		V	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL</b>				
	<b>Pengecekan Saldo Neraca Percobaan</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruai		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	<b>Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	<b>Akun-Akun yang tidak boleh ada</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi		V	Tidak
	<b>Jika Bukan Satker BLU</b>	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxx dan 2xxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	<b>Terkait Satker BLU</b>	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	<b>Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas</b>	Ada	Tidak	Seharusnya

1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	<b>Hibah Langsung</b>	<b>Ada</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke		V	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh		V	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	<b>Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal</b>			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		V	Tidak
	<b>Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		V	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual			Ya
	<b>Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun		V	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	<b>Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
<b>PENGECEKAN NERACA</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos Neraca</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	V		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?		V	Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
<b>PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LO</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?	V		Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak

<b>PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LPE</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	<b>V</b>		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		<b>V</b>	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		<b>V</b>	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		<b>V</b>	Tidak
	<b>Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud? Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			Ya
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar			Ya
<b>PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)</b>				
	<b>Pengecekan Pos-pos LRA/B/P</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		<b>V</b>	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		<b>V</b>	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		<b>V</b>	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		<b>V</b>	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		<b>V</b>	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		<b>V</b>	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		<b>V</b>	Ya
<b>TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN</b>				
	<b>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		<b>V</b>	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		<b>V</b>	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	<b>V</b>		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)		<b>V</b>	Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		<b>V</b>	Ya
	<b>Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat &amp; Beban Bansos</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya/Tidak
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	<b>Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		<b>V</b>	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		<b>V</b>	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		<b>V</b>	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua		<b>V</b>	Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua		<b>V</b>	Ya/Tidak
<b>TELAAH LK BLU</b>				
	<b>LPSAL BLU</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak

3	Apakah formula perhitungnan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
<b>LAK BLU</b>		<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Seharusnya</b>
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

**LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN**

*"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk*

Mengetahui  
Pejabat Penyusun LKKL,



(Rizal Mutaqin, S.E., M.M.)  
NIP. 197605212005021001

Jakarta, 19 Februari 2026  
Penelaah,

(Andri Mardika, S.E)  
NIP. 199708232020121005